

RINGKASAN

NOVA SIAMA DEWI. 21105520041. *Implementasi Kebijakan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar)*. Di bawah bimbingan: 1. Jalu Sora Wicitra, S.AP., M.AP., 2. Anwar Hakim Darajat, S.Sos., M.M.

Untuk memastikan masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyerahan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (15) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas atau disingkat Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Tujuan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah oleh pengembang adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama proses implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam variabel yaitu sasaran kebijakan, dukungan sumber daya, koordinasi organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, dan disposisi implementator. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan Perumahan Tirtomadu Residence. Metode untuk mengumpulkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat ini telah memberikan pedoman yang jelas, tetapi masih terdapat kendala yaitu termasuk masalah komunikasi dan koordinasi antar lembaga, waktu yang lama untuk dokumen seperti sertifikat PSU, dan jumlah sumber daya yang terbatas, hal tersebut berkontribusi pada penundaan proses penyerahan. Kurangnya pelatihan teknis juga mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu penyerahan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi semua pihak, mempercepat proses sertifikasi, memperkuat kemampuan sumber daya, dan pelatihan teknis untuk pelaksana.

Kata Kunci : Perumahan, Penyerahan PSU, Implementasi

SUMMARY

NOVA SIAMA DEWI. 21105520041. *Implementation of the Policy on the Handover of Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities from Developers to Local Governments (Study at the Public Housing and Residential Areas Service of Blitar City).* Di bawah bimbingan: 1. Jalu Sora Wicitra, S.AP., M.AP., 2. Anwar Hakim Darajat, S.Sos., M.M.

To ensure that the community has adequate housing, as well as a healthy, harmonious, and sustainable environment, local governments are responsible for managing housing and residential areas. One policy developed by the Blitar City Government to encourage the provision and transfer of housing infrastructure, facilities, and utilities is the issuance of Blitar Mayoral Regulation Number 24 of 2020 concerning the Transfer of Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities from Developers to Regional Governments. Article 1 paragraph (15) states that the Transfer of Infrastructure, Facilities, and Utilities, or PSU Transfer, is the transfer of land with buildings and/or land without buildings as assets and management responsibilities from developers to the Regional Government. The purpose of the transfer of housing and residential infrastructure, facilities, and utilities to the regional government by developers is to describe and analyze the implementation of the policy of transferring Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities from Developers to Regional Governments and to identify obstacles encountered during the implementation process of the policy of transferring Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities from Developers to Regional Governments.

This study uses the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which has six variables: policy objectives, resource support, organizational coordination, implementer characteristics, economic conditions, and implementer disposition. Qualitative methods were used in this study, and the research location was the Blitar City Public Housing and Settlement Agency and the Tirtomadu Residence housing complex. Data collection methods included observation, interviews, and documentation.

The results indicate that while the current policy provides clear guidelines, obstacles remain, including communication and coordination issues between agencies, lengthy processing times for documents such as PSU certificates, and limited resources, all contributing to delays in the handover process. Lack of technical training also impacts the quality and timeliness of handover. Therefore, coordination between all parties, expedited certification processes, strengthened resource capabilities, and technical training for implementers are needed.

Keywords: *Housing, PSU Handover, Implementation*